**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK**

**(STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA SURAKARTA)**

**HALAMAN JUDUL**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Pada Fakultas Ekonomi

Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta

**Disusun oleh:**

**ADITYA WIDIATAMA**

**NPM: 2017020072**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**UNIVERSITAS ISLAM BATIK**

**SURAKARTA**

**2022**

# C:\Users\Uniba Copy Center\Pictures\scan364.jpgHALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini setelah membaca skripsi dengan judul

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK**

**(STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA SURAKARTA)**

**Oleh :**

**ADITYA WIDIATAMA**

**NPM: 2017020072**

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I  Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M. | Surakarta, 27 Juli 2022  Pembimbing II  Fithri Setya Marwati, S.E., M.M. |
| Mengetahui,  Kepala Program Studi Manajemen  Fithri Setya Marwati, S.E., M.M. | |

NIDN. 0603088405

# C:\Users\Uniba Copy Center\Pictures\scan362.jpgHALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disahkan untuk memenuhi syarat dan tugas guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 26 Agustus 2022

***Tim Penguji***

1. Dr. Hj. Sudarwati, SE.MM ( )

Ketua

1. Fithri Setya Marwati, SE.MM ( )

Sekretaris

1. Dr. Sarsono, SE.M.Si ( )

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Batik Surakarta

Dr. Dra. Ec. Hj. Istiatin, SE., M.M

NIDN. 621045901

# C:\Users\Uniba Copy Center\Pictures\scan363.jpgSURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Widiatama

NIM : 2017020072

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Surakarta, 27 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

(Aditya Widiatama)

# MOTTO

***"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."***

***- HR Tirmidzi***

***"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."***

***- HR. Muslim***

# PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk:

* Ayahanda dan Ibunda saya yang tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya dari saya masih kecil hingga saya dewasa dan yang selalu mendoakan serta mendukung saya untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan saya.
* Segenap keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
* Semua kerabat dan teman-teman tercinta.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil’alamin*, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta)”*.Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Amir Junaidi, SH, MH selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Dr. Dra. Ec. Hj. Istiatin, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Fithri Setya Marwati, S.E., M.M selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta dan selaku pembimbing kedua yang turut memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di bangku kuliah dengan segala memaklumi segala keterbatasan kemampuan dalam memahami beberapa studi yang diberikan.
6. Keluarga, kerabat, rekan-rekan, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan terhadap penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari karya tulis ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan tulisan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta, 27 Juli 2022

Aditya Widiatama

# ABSTRAK

**Aditya Widiatama. 2017020072. (2022).**Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta). Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel-variabel ini dapat berasal dari individu atau internal wajib pajak maupun dari eksternal wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Sampel yang dapat diambil adalah 60 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu*.* Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabiltas, regresi linear berganda dan uji statistik uji t. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS for Windows versi 24*.

Hasil analisis data menunujukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, masing-masing variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci** : Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, Kepatuhan wajib pajak.

# ABSTRACT

*Taxpayer compliance is critical for creating orderly tax payments in Indonesia. Several factors can influence taxpayer compliance. Individual or internal taxpayers, as well as foreign taxpayers, can provide these factors. The goal of this study was to look into the impact of taxpayer awareness, knowledge, and tax audits on taxpayer compliance.*

*The data used in this study are primary data gathered from questionnaires sent to employees of the Surakarta City Revenue, Financial Management, and Regional Assets Office (BPPKAD). The sample size is limited to 60 responders. Purposive sampling is utilized, which means that the sample technique is determined by particular factors. The validity test, reliability test, multiple linear regression, and statistical test t test were employed in this study. The SPSS for Windows version 24 program was used for hypothesis testing.*

*Data analysis results reveal that taxpayer awareness, taxpayer knowledge, and tax audit all have an impact on taxpayer compliance. Each variable of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, and tax audit has an impact on taxpayer compliance to some extent. This research will be utilized as a reference for future decision making, particularly in an effort to promote taxpayer compliance.*

***Keywords:*** *Taxpayer awareness, Taxpayer knowledge, Tax audit, Taxpayer compliance.*

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc110267623)

[HALAMAN PERSETUJUAN ii](#_Toc110267624)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc110267625)

[SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv](#_Toc110267626)

[MOTTO v](#_Toc110267638)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc110267643)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc110267648)

[ABSTRAK ix](#_Toc110267649)

[ABSTRACT x](#_Toc110267650)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc110267654)

[DAFTAR TABEL xvi](#_Toc110267655)

[DAFTAR GAMBAR xvii](#_Toc110267656)

[DAFTAR LAMPIRAN xviii](#_Toc110267657)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc110267658)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc110267659)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc110267660)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc110267661)

[D. Manfaat Penelitian 7](#_Toc110267662)

[BAB II LANDASAN TEORI 10](#_Toc110267663)

[A. Pajak 10](#_Toc110267664)

[1. Pengertian Pajak 10](#_Toc110267665)

[2. Wajib Pajak 12](#_Toc110267673)

[3. Fungsi Pajak 13](#_Toc110267694)

[B. Kepatuhan Wajib Pajak 14](#_Toc110267704)

[1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 14](#_Toc110267705)

[2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 16](#_Toc110267706)

[3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 18](#_Toc110267707)

[C. Kesadaran Wajib Pajak 19](#_Toc110267708)

[1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak 19](#_Toc110267709)

[2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak 21](#_Toc110267710)

[D. Pengetahuan Wajib Pajak 21](#_Toc110267711)

[1. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak 21](#_Toc110267712)

[2. Indikator Pengetahuan Wajib Pajak 26](#_Toc110267713)

[E. Pemeriksaan Pajak 28](#_Toc110267714)

[1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 28](#_Toc110267715)

[2. Faktor-faktor Pemeriksaan Pajak 29](#_Toc110267716)

[3. Standar Pemeriksaan Pajak 30](#_Toc110267717)

[4. Tujuan Pemeriksaan Pajak 32](#_Toc110267718)

[5. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 34](#_Toc110267719)

[6. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 35](#_Toc110267720)

[7. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 35](#_Toc110267721)

[8. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan 36](#_Toc110267722)

[9. Jangka Waktu Pemeriksaan 38](#_Toc110267723)

[F. Penelitian yang Relevan 39](#_Toc110267724)

[G. Kerangka Pemikiran 53](#_Toc110267725)

[H. Hipotesis Penelitian 55](#_Toc110267726)

[1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 55](#_Toc110267727)

[2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 56](#_Toc110267728)

[3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 57](#_Toc110267729)

[BAB III METODOLOGI PENELITIAN 59](#_Toc110267730)

[A. Jenis Penelitian 59](#_Toc110267731)

[B. Tempat dan Waktu Penelitian 59](#_Toc110267732)

[1. Tempat Penelitian 59](#_Toc110267733)

[2. Waktu Penelitian 60](#_Toc110267735)

[C. Populasi, Sampling, dan Teknik Sampling 60](#_Toc110267737)

[1. Populasi 60](#_Toc110267738)

[2. Sampel 60](#_Toc110267739)

[D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 62](#_Toc110267740)

[1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 62](#_Toc110267742)

[2. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) 63](#_Toc110267743)

[3. Pemeriksaan Pajak (X3) 63](#_Toc110267744)

[4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 64](#_Toc110267745)

[E. Sumber Data 68](#_Toc110267783)

[1. Data Primer 68](#_Toc110267784)

[2. Data Sekunder 68](#_Toc110267785)

[F. Teknik Pengumpulan Data 68](#_Toc110267786)

[1. Kuesioner 68](#_Toc110267787)

[2. Dokumentasi 70](#_Toc110267788)

[3. Metode Kepustakaan 70](#_Toc110267789)

[G. Metode Analisis Data 70](#_Toc110267790)

[1. Statistik Deskriptif 70](#_Toc110267791)

[2. Uji Instrumen 71](#_Toc110267792)

[3. Uji Analisis Regresi 75](#_Toc110267793)

[4. Uji t 75](#_Toc110267794)

[5. Uji F 76](#_Toc110267795)

[6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 76](#_Toc110267796)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 78](#_Toc110267797)

[A. Deskripsi Data Subyek Penelitian 78](#_Toc110267798)

[B. Hasil Penelitian 85](#_Toc110267799)

[1. Analisis Deskripsi Jenis Kelamin 86](#_Toc110267800)

[2. Analisis Deskripsi Usia 87](#_Toc110267802)

[3. Analisis Deskripsi Tingkat Pendidikan 88](#_Toc110267803)

[4. Analisis Deskripsi Masa Kerja 89](#_Toc110267804)

[5. Distribusi Tanggapan Responden 89](#_Toc110267805)

[C. Analisis Data 96](#_Toc110267806)

[1. Uji Validitas 96](#_Toc110267807)

[2. Uji Reliabilitas 98](#_Toc110267808)

[3. Analisis Regresi Linear Berganda 99](#_Toc110267809)

[4. Analisis Uji t (t-test) 101](#_Toc110267810)

[5. Uji F 103](#_Toc110267812)

[6. Koefisien determinasi (R²) 104](#_Toc110267813)

[D. Pembahasan 105](#_Toc110267814)

[1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 105](#_Toc110267815)

[2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 108](#_Toc110267816)

[3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 111](#_Toc110267817)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 113](#_Toc110267818)

[A. Kesimpulan 113](#_Toc110267819)

[B. Saran 114](#_Toc110267820)

[DAFTAR PUSTAKA 115](#_Toc110267821)

[LAMPIRAN 120](#_Toc110267822)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 2. 1. Kajian Penelitian yang Relevam 40](#_Toc110267854)

[Tabel 3. 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 65](#_Toc110267861)

[Tabel 3. 2. Uji Validitas 73](#_Toc110267862)

[Tabel 3. 3. Hasil Uji Reliabilitas 74](#_Toc110267863)

[Tabel 4. 1. Rincian Jumlah Pegawai BPPKAD Kota Surakarta](#_Toc110267869)

[(Menurut Jabatan) 85](#_Toc110267869)

[Tabel 4. 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 87](#_Toc110267870)

[Tabel 4. 3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 87](#_Toc110267871)

[Tabel 4. 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 89](#_Toc110267872)

[Tabel 4. 5. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 89](#_Toc110267873)

[Tabel 4. 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak 90](#_Toc110267874)

[Tabel 4. 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak 92](#_Toc110267875)

[Tabel 4. 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Pemeriksaan Pajak 94](#_Toc110267876)

[Tabel 4. 9. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak 95](#_Toc110267877)

[Tabel 4. 10. Uji Validitas 98](#_Toc110267878)

[Tabel 4. 11. Hasil Uji Reliabilitas 99](#_Toc110267879)

[Tabel 4. 12. Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda 100](#_Toc110267880)

[Tabel 4. 13. Uji F 103](#_Toc110267881)

[Tabel 4. 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 104](#_Toc110267882)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2. 1.Kerangka Pemikiran 54](#_Toc110267957)

[Gambar 4. 1.Struktur Organisasi BPPKAD Kota Surakarta 84](#_Toc110267968)

# DAFTAR LAMPIRAN

[Lampiran 1.Kuesioner 121](#_Toc110267990)

[Lampiran 2.Tabulasi Data Penelitian 125](#_Toc110267991)

[Lampiran 3. Hasil Olah Data 133](#_Toc110267992)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Tercatat bahwa target penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai angka Rp 1.700 trilun lebih pada tahun 2019. Menkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19.

Dilihat dari fenomena yang ada, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah meningkat akan tetapi pajak yang diharapkan masih belum mencapi target. Dengan ini, masih perlu adanya peningkatan dari tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri, agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri.

Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini fiskus perlu memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi penerimaan dimasa yang akan datang dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kejadian dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya. Kepatuhan merupakan suatu bagian penting untuk meningkatkan pencapaian pajak yang telah direalisasikan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self-assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi perpajakan. Dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau kepatuhan pajak melalui kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak.

Untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran dari wajib pajak, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Suandy (2011:94), “kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang”.

Kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauannya dalam membayar pajak (Samrotun dan Kustiyah, 2014). Penelitian Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Fitria (2017) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan wajib pajak juga sangat berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Rahayu (2017) dan Fitria (2017) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak memengaruhi kemauan membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirchler et al. (2008), kepatuhan pajak dapat dipaksakan dengan menggunakan *power of authority* kepada wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*). Adanya pemeriksaan pajak akan menimbulkan konsekuensi–konsekuensi yang berakibat ketidaknyamanan bagi para wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan berupa pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, baik melalui surat teguran ataupun tindakan tegas. Reinganum dan Wilde (1985) mengatakan dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan lebih berhatihati dalam melaporkan jumlah penghasilannya.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi *self-assessment system*. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak berpedoman kepada undang-undang (Rahayu, 2013, hal. 245). Keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilannya bergantung pada kemungkinan mereka akan diperiksa atau tidak (Allingham & Sandmo, 1972).

Penelitian yang dilakukan oleh Advani et al. (2015) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk mendapatkan penilaian tentang kepatuhan pajak serta melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Mandagi et al. (2014) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 64,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan sisanya merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak; kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan wajib pajak, sehingga memotivasi penulis untuk meninjau kembali kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk: mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak (Studi Pada** **Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta)”.**

## Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai suatu tujuaan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

## Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai wacana yang diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi para akademisi dalam penelitian terkait dengan perpajakan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengembangan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

1. Manfaat bagi Praktisi
2. Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen kantor pelayanan pajak dan badan pengelolaan keuangan agar dapat dijadikan acuan oleh kantor pelayanan pajak dan badan pengelolan keuangan untuk menentukan kebijakan pajak terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai faktor yang diteliti pada penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kantor pelayanan pajak dan badan pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan performa perpajakan.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama ditinjau dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi yang mungkin diperlukan untuk mendukung penelitian selanjutnya.

# 

# BAB II LANDASAN TEORI

Penelitian dan teori mempunyai hubungan erat, karena teori memberikan dukungan kepada penelitian dan sebaliknya penelitian memberikan kontribusi kepada teori. Berdasarkan pengertian di atas, maka perlu kiranya untuk membahas serangkaian teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yang berkaitan dengan pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak.

## Pajak

### Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan (sttdd) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pemerintah Republik Indonesia)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2011:2)

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Sudirman, Amiruddin (2012:2) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik yaitu sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesajahteraan secara umum.

Menurut Soeparman dalam Wahono (2012:2) dalam bukunya “Mengurus Pajak Itu Mudah” bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian pajak di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pengertian pajak di atas, pihak perorangan atau badan yang harus membayar pungutan wajib (pajak) tidak akan mendapat imbalan apapun secara langsung. Melainkan, pihak-pihak tersebut akan merasakan manfaat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh negara.

### Wajib Pajak

Sesuai dengan isi dari Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTDD UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan. (Pemerintahan Republik Indonesia)

Dalam bukunya (Prasetyono, 2012:75-88), dituliskan kewajiban dan hak wajib pajak diantaranya yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak
2. Kewajiban Mendaftarkan Diri
3. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/ Pemungutan, dan Pelaporan
4. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa
5. Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa
6. Kewajiban Memberi Data
7. Hak Wajib Pajak
8. Kerahasiaan Wajib Pajak
9. Penundaan Pembayaran
10. Pengangsuran Pembayaran
11. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
12. Pengurangan PPh Pasal 25
13. Pengurangan PBB
14. Pembebasan Pajak
15. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
16. Pajak Ditanggung Pemerintah
17. Insentif Perpajakan
18. Penetapan, Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

### Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia. (Mardiasmo, 2011).

Dapat dikatakan bahwa pajak selama ini masih menjadi sektor penerimaan Negara yang paling besar, dan hampir membiayai pembangunan negara sepenuhnya. Dalam APBN Tahun 2016 sebesar 75% pendapatan Negara diperoleh dari sektor pajak. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

## Kepatuhan Wajib Pajak

### Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kepatuhan pajak (*tax compliance*) juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

1. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

1. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

1. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adnya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

1. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

1. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu: kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

### Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

## Kesadaran Wajib Pajak

### Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Safri (2013), kesadaran adalah perilaku seseorang yang terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan dan anggapan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan mengenai pajak tersebut. Dengan demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu perilaku atau tindakan wajib pajak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami bagaimana cara bertindak atau menyikapi tehadap realitas. Menurut Nurlaela (2013), terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua yaitu kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami jika penundaan dalam membayar pajak dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar pajak karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan kesadaran wajib pajak di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemauan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

### Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri (2013), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak

Adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan negara. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

1. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah

Adanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak.

1. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Dalam membayar pajak harus dilakukan dengan kesadaran wajib pajak sehingga, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apabila wajib pajak mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka bentuk pertisipasi dari wajib pajak dapat menunjang keuangan negara.

## Pengetahuan Wajib Pajak

### Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Notoatmodjo (2015:24) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, yang terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan adalah domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang.

Menurut Taufik (2017:24) yang menjelaskan tentang pengetahuan adalah sebagai berikut: “Pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya).

Menurut Supriyati (2018:23) bahwa pengetahuan perpajakan adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Menurut Veronica Carolina (2018:7) bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Adapun pengetahuan pajak yang diungkapkan Pancawati Hardiningsih (2018:11) bahwa proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara.

Fallan dalam Rahayu (2016:141) mengemukakan bahwa memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undangundang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sedangkan, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, oganisasi masyarakat, dan lain-lain.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari persentuhan panca indra terhadap objek tertentu. Pada dasarnya pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan dan berfikir yang menjadi dasar untuk manusia bersikap dan bertindak (Kusuma, 2015). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu pendidikan, informasi/ media masa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia.

Fidel dalam Rohmawati et.al (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan pengingatan mengenai sesuatu yang bersifat spesifik, metode, universal, pola dan struktur sumber. Pengingatan ini melibatkan pemikiran terhadap kondisi yang nyata. Pengetahuan seseorang mengenai suatu objek memiliki dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang tersebut. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman terhadap konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak, dan pengisian laporan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan ini tidak hanya sekedar memahami konseptual berdasarkan undang–undang Perpajakan, Surat Edaran, Surat Keputusan, dan Keputusan Menteri Keuangan tetapi juga adanya tuntutan keterampilan teknis mengenai bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2017).

Rahayu (2016) menjelaskan bahwa ada tiga konsep pengetahauan atau pemahaman pajak oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menjadi aspek penting bagi sikap Wajib Pajak dalam proses menjalankan sistem-sistem perpajakan yang adil. Peningkatan pengetahuan perpajakan yang berasal dari pendidikan perpajakan formal maupun tidak formal akan memiliki dampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya. Selain itu peningkatan pemahaman mengenai membayar pajak sebagai wujud gotong-royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan nasional dan pembiayaan pemerintah. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat dilihat dari bagaimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang harus membayar pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan, dan bagaimana cara menghitung pajak terutangnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengetahuan wajib pajak di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak atau pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

### Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Widyawati dan Nurlis (2016), menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari (1) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan training.

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2018:8) adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak

Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

1. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan.

## Pemeriksaan Pajak

### Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak (Tax Audit) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan /atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan definisi-definisi terkait dengan pemeriksaan pajak di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan.

### Faktor-faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer Assisted Audit Technique (CAAT).

1. Jumlah sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

1. Kualitas sumber daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

1. Sarana dan prasarana pemeriksaan

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Languange* (ACL), contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

### Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar dari Pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis;
2. Jujur dan bersih;
3. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.
4. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

1. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak
2. Mempelajari profil Wajib Pajak;
3. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak;
4. Mempelajari data lain yang relevan.
5. Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan. rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2 dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi:

1. Penentuan kriteria pemeriksaan;
2. Jenis pemeriksaan;
3. Ruang lingkup pemeriksaan;
4. Identifikasi masalah;
5. Sarana pendukung;
6. Menentukan pos-pos yang akan diperiksa.
7. Menyusun program pemeriksaan

Penyusuna program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah di telaah.

1. Menyiapkan sarana pemeriksaan

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim pemeriska harus menyiapkan tanda pengenal pemeriksa pajak, SP2, dan sarana pemeriksaan lainnya.

1. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak.

### Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
4. Pencocokan data atau alat keterangan;
5. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

### Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak diperlukan pemahaman mengenai ruang lingkup pemeriksaaan yaitu:

1. Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

1. Pemeriksaan sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan seerhana dilkukan karena selama inipemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbana sumber daya lainnya, baik dari Administrasi Pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak”.

### Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
2. SPT lebih bayar;
3. SPT rugi;
4. SPT yang menyalahi norma perhitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.

1. Pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktut Jendral Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
2. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar;
3. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.

### Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
3. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
4. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
5. Memberi keterangan yang diperlukan.
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
7. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas”.

### Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah:

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan meliputi:
2. Meminta tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
3. Meminta surat pemberitahuan pemeriksaan pajak.
4. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksan kepada pemeriksa pajak.
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci.
6. Meminta rincian dan penjelasan berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan kepada pemeriksa pajak
7. Memberikan sanggahan-sanggahan terhadap koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka closing conference.
8. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.
9. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan.
10. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk:
11. Memenuhi panggilan untuk datang menhadiri pemeriksaan kantor sesuai waktu yang telah ditentukan.
12. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
13. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
14. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan.
15. Menandatangani surat pernyatan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan.
16. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan bila Wajib Pajak tidak setuju atau tidak sepenuhnya setuju terhadap hasil pemeriksaan.
17. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila Wajib Pajak/Wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
18. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

### Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemriksaan pajak menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lam, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

## Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang perpajakan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1.   
Kajian Penelitian yang Relevam

| No | Nama Peneliti/ Tahun | Judul | Metode | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arif Nugrahanto (2019) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *difference-in-differences;* 2. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. | Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang diperiksa maupun Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. |
| 2 | Fransiskus Eddy Wahyono (2018) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kota Tangerang. | 1. Penelitian ini memiliki jenis *Causal Expalanator*; 2. Jumlah sampel adalah 100 responden; 3. Pengambilan sampel dengan Teknik probability sampling; 4. Teknik analisis menggunakan regresi linier. | Pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan |
| 3 | Efrie Surya Perdana (2020) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder; 2. Jumlah sampel adalah 100 responden; 3. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. | Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan |
| 4 | Dona Fitria (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif; 2. Pengambilan sampel dengan *proposional cluster random sampling;* 3. Jumlah sampel adalah 100 responden; 4. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 5 | Yosi Yulia (2020) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif; 2. Sampel berjumlah 93 responden; 3. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. | Secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6 | Andhini Larasati Lesmana (2020) | Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif; 2. Sampel berjumlah 270; 3. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin; 4. Metode analisis data menggunakan Metode Persamaan Struktural. | Pemeriksaan Pajak (PERIKSA) sebesar 1.18 dan Pengetahuan Pajak (PENGET) sebesar 0.54 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (PATUH), tetapi Sanksi (SANKSI) sebesar 3.35, Moral (MORAL) 3.80, berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak. |
| 7 | Anis Syamsu Rizal (2019) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner; 2. Jumlah sampel adalah 100 responden; 3. Teknik sampling menggunakan non probability sampling; 4. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. | “Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. |
| 8 | Mochamad Annas Nasrudin Siregar (2020) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur) | 1. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif; 2. Sampel berjumlah 100; 3. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin; 4. Teknik analisis dengan regresi linear berganda. | (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Penerapan E-Samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor |
| 9 | Kristo Josep Manek (2019) | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer; 2. Jumlah sampel adalah 100 responden; 3. Teknik analisis dengan regresi linear berganda. | Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. |
| 10 | Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia | 1. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan kuesioner; 2. Populasi sebanyak 154; 3. Teknik analisis dengan regresi linear berganda. | Pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. |
| 11 | Oki Sri Hartini (2018) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees) | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner; 2. Populasi terdiri dari 50 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees; 3. Pengambilan sampel dengan *simple random sampling*; 4. Teknik analisis dengan regresi linear berganda. | Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. |
| 12 | Nadia Sal Sabila (2020) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data utama dan pendukung; 2. Sampel berjumlah 100 responden; 3. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. | Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. UMKM terdaftar di Kantor BAPPEDA Pekalongan. |
| 13 | Jabida Latuamury (2021) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak | 1. Jenis penelitian adalah kuantitatif; 2. Jumlah sampel adalah 99 responden; 3. Pengambilan sampel dengan rumus Slovin; 4. Teknik analisis regresi berganda dengan pengujian hipotesis. | Pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib memiliki pengaruh signfikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan model regresi yang memiliki koefisien dan konstanta model yang kuat dan signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sanksi dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. |
| 14 | Miranda Turusaka Sau (2019) | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tambora | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif; 2. Jumlah populasi adalah 5.639 wajib pajak; 3. Sampel ditentukan dengan metode sensus; 4. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. | Jumlah Wajib Pajak Badan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Tambora. Sedangkan jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Pelayanan KPP Tambora. |
| 15 | Suryo Prasetya Riyadi (2021) | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif; 2. Jumlah sampel adalah 60 responden; 3. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda | Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui adanya perbedaan hasil pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak.

Pada penelitian Arif Nugrahanto (2019) dengan judul “*Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia*” menunjukkan hasil dimana tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang diperiksa maupun Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak antara lain disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kecilnya cakupan pemeriksaan pajak (*Audit Coverage Ratio*), adanya fenomena *bomb crater effect* dan hasil *typeupdating* risiko pemeriksaan.

Penelitian Fransiskus Eddy Wahyono (2018) dengan judul “*Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kota Tangerang*” menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan, dimana pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 75.4%.

Penelitian Efrie Surya Perdana (2020) dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*” menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Penelitian Dona Fitria (2017) dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” menemukan bahwa 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Yosi Yulia (2020) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang*” menemukan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Andhini Larasati Lesmana (2020) dengan judul “*Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*” menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak (PERIKSA) sebesar 1.18 dan Pengetahuan Pajak (PENGET) sebesar 0.54 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (PATUH), tetapi Sanksi (SANKSI) sebesar 3.35, Moral (MORAL) 3.80, berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak.

Penelitian Anis Syamsu Rizal (2019) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*” menunjukkan bahwa “pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Mochamad Annas Nasrudin Siregar (2020) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)*” membuktikan bahwa (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Penerapan E-Samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Kristo Josep Manek (2019) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto.

Penelitian Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*” menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan.

Penelitian Oki Sri Hartini (2018) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Penelitian Nadia Sal Sabila (2020) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan*” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. UMKM terdaftar di Kantor BAPPEDA Pekalongan.

Penelitian Jabida Latuamury (2021) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib memiliki pengaruh signfikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan model regresi yang memiliki koefisien dan konstanta model yang kuat dan signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sanksi dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan.

Penelitian Miranda Turusaka Sau (2019) dengan judul “*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tambora*” menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Tambora. Sedangkan jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Pelayanan KPP Tambora.

Penelitian Suryo Prasetya Riyadi (2021) dengan judul “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*” mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada variabel dan populasi yang digunakan. Pada penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak yang digunakan sebagai faktor penentu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah, memahami, pengaruh antara variabel independen yang berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kesadaran Wajib Pajak

(X1)

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

**H1**

Pengetahuan Wajib Pajak

(X2)

**H2**

**H3**

Pemeriksaan Pajak

(X3)

Gambar 2. 1.Kerangka Pemikiran

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini variabel independen (X) ditunjukan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu, suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Hasseldine, J., Holland, K. and Rijt, P.V. (2009) dalam Oladipupo dan Obazee (2016) pengetahuan pajak adalah tingkat kesadaran atau kepekaan pembayar pajak terhadap peraturan pajak.

1. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:36) menyatakan pemeriksaan adalah: Serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan yaitu variable kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam statistik dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2010: 84). Mengacu pada kerangka berfikir dan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena keberhasilan pemungutan pajak ditentukan apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian Manek (2019) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi dan Merkusiwati (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Kemudian Nafiah et al, (2021) juga membuktikan hasil yang konsisten yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil-hasil penelitian tersebut di dukung oleh hasil penelitian Madjodjo (2022) yang membuktikan bahwa baik secara parsial maupun simultan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kepulauan Tidore. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

**H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hasseldine, J., Holland, K. and Rijt, P.V. (2009) dalam Oladipupo dan Obazee (2016) pengetahuan pajak adalah tingkat kesadaran atau kepekaan pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak menjadi sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya.

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Rahayu (2010: 112) menyatakan bahwa “kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil”. Dari pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut memberikan dampak pada wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan “wujud gotong royong nasional untuk menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional yang wujud nyatanya dapat dinikmati oleh masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri”. Hasil penelitian Manek (2019) menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

**H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan operasional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (Waluyo dalam Dewi, 2012) Tujuan Pemeriksaan pajak adalah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan yang kedua adalah dari pemeriksaan pajak adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:94). Penelitian Wahyono (2018) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

**H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

# 

# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Kuesioner tersebut dibagikan kepada karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk menganalisa pengaruh variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

Sugiyono (2017: 35) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Tempat dan Waktu Penelitian

### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta yang berlokasi diJl. Jend. Sudirman, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133.

### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan Kantor Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

## Populasi, Sampling, dan Teknik Sampling

### Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 115), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta yang berjumlah total 147 orang.

### Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 116), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan penggunaan sampel adalah peneliti dapat memperoleh data yang dapat mencerminkan keadaan populasi dengan biaya penelitian yang lebih murah dan waktu penelitian yang lebih tepat.

Teknik sampling adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristiknya tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2017). Dalam Cooper & Schender (1998) Populasi merupakan sekumpulan elemen yang darinya diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan tentang suatu hal. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta yang berjumlah 147 orang. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling technique*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan meggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85).

Kriteria wajib pajak yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bekerja sebagai karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta serta bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 60 orang karyawan.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasionalisasi Variabel atau operasional suatu variabel menurut (Sugiyono 2010) sebagai berikut: Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

### Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak yaitu, suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Prakosa (2017). Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan;
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara;
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara;
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar. (Sari, 2017) dalam Madjodjo (2022)

### Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010:139).

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak;
2. Kesadaran pentingnya membayar pajak;
3. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak; dan
4. Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. (Sari, 2016)

### Pemeriksaan Pajak (X3)

Menurut Siti Kurnia (2010:245), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assesment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Tinjauan perpajakan Indonesia yang di terbitkan oleh kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada penelitian ini di ukur dengan indikator peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan pada pasal 1 ayat 2 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system self assesstment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Kurnia Rahayu, 2010:19).

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar pajak tepat pada waktunya dan tanpa ada pemaksaan;
2. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak; dan
3. Melaporkan informasi yang diperlukan. (Rahayu, 2010)

Ringkasan definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1.Definisi Operasional Variabel Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Definisi | Indikator | Kisi-kisi Pertanyaan |
| **Kesadaran wajib pajak (X1)** | Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, Mintje (2016). | 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar (Sari, 2017) dalam Madjodjo (2022) | 1. Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. 2. Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. 3. Saya mengetahui membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan daerah. 4. Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran Pajak. 5. Saya membayar dan melaporkan Pajak dengan sukarela. |
| **Pengetahuan wajib pajak (X2)** | Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. (Wijayanti dkk, 2015:311) | 1. Pemahaman wajib pajak; 2. Kesadaran pentingnya membayar pajak; 3. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak; dan 4. Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. (Sari, 2016) | 1. Saya mengetahui ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pajak yang berlaku. 2. Saya mengetahui bahwa pajak harus dilaporkan dan dibayarkan tepat waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. 3. Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar baik untuk pusat maupun daerah. 4. Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. 5. Saya dapat dengan mudah memahami prosedur pembayaran pajak yang berlaku. 6. Saya mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan. 7. Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila pembayaran pajak tidak dilakukan tepat pada waktunya. 8. Saya mengetahui adanya sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. 9. Saya dapat memahami sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. |
| **Pemeriksaan pajak (X3)** | Menurut Siti Kurnia (2010:245), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan self assesment system yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan pada pasal 1 ayat 2 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. | 1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan. 2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. 4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, kurang bayar maupun lebih bayar, maka harus dilakukan pemeriksaan. 5. Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. |
| **Kepatuhan wajib pajak (Y)** | Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, Arisandy (2017) dan Ilhamsyah et al (2016). | 1. Membayar pajak tepat pada waktunya dan tanpa ada pemaksaan; 2. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak; dan 3. Melaporkan informasi yang diperlukan. (Rahayu, 2010) | 1. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. 3. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. |

Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pertanyaan penelitian adalah skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:14), skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

## Sumber Data

### Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000: 55). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner kepada responden karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

### Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti (Marzuki, 2000: 56). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada Sugiyono (2017: 115), yaitu berupa jumlah karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta serta dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data

### Kuesioner

Metode pengumpulan data yang berisi serangkaian pertanyaan yang diserahkan kepada responden guna diisi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dalam bentuk angket (kuesioner) dan diisi oleh responden dalam bentuk pertanyaan dan sudah ditentukan alternatif dari setiap pertanyaan. Dalam pengisian responden hanya diperintahkan untuk memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dan sesuai keadaan sebenarnya.

Jumlah pertanyaan juga dibuat oleh peneliti seminimal mungkin sebab menurut Suharsimi Arikunto, (2016: 46) pengumpulan data melalui kuesioner memiliki kelebihan yaitu:

1. Dapat digunakan secara serentak kepada banyak responden sekaligus.
2. Waktu pelaksanaan tidak mengikat disesuaikan dengan waktu yang dimiliki responden.
3. Bisa dibuat anonim sehingga responden bisa jujur dan bebas dalam menjawab,

Oleh sebab itu peneliti membuat langkah-langkah dalam menyusun kuesioner, jadi kuesioner tidak perlu terlalu banyak, untuk langkah-langkah menyusun kuesioner adalah:

1. Melakukan spesifikasi data sesuai dengan lingkup masalah dan tujuan peneliti.
2. Menyusun item-item yang diperkirakan dapat mengungkap aspek yang akan diteliti
3. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk,
4. Menguji jawaban dengan mengadakan uji validitas maupun reliabilitas kuesioner.

### Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:236). Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan,baik data tertulis, gambar, maupun suara. Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis.

## Metode Analisis Data

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif yang menjabarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data, yaitu dengan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data akan dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS versi 23.

### Uji Instrumen

1. **Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2016: 168). Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pengukuran validitas pada penelitian digunakan metode *factor analysis*. Analisis faktor merupakan proses mendefinisikan struktur saling hubungan (korelasi) atau sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut *factor* (Ghozali, 2018: 253). Kriteria data yang dapat dianalisis faktor adalah data yang menunjukan KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy*) > 0,5 dan *Bertle’s test of spencity* pada signifikan < 0,05. Tinggi rendahnya validitas data suatu angket dapat dilihat dari FL (*factor loading*). Menurut Hair. J.F. J.R., William. C. Black, Barry. J. Babin, Rolph. E. Anderson, dan Ronald. L. Thatham (2006: 115) jika FL suatu item > 0,4 maka item tersebut valid dan sebaliknya. Semakin besar FL, maka semakin penting *loading* tersebut menginterprestasikan konstruknya.

Secara lebih spesifik, dikarenakan konstruk yang hendak diuji merupakan pengujian kembali dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana pada penelitian telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk konstruk maka pada penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Penelitian ini uji validitas dengan metode CFA dibantu dengan perangkat lunak program *SPSS for Windows*. Hair *et.al* (2006: 115) menyatakan bahwa suatu analisis faktor dinyatakan *feasible* bila memenuhi syarat:

1. Uji KMO dan *Bartlet’s Test* diatas 0,5 dan signifikan di bawah 0,05.
2. Koefisien *Anti Image Matrice* sebagai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) minimal 0,4.

Tinggi rendahnya validitas suatu angket dengan melihat FL (*Factor Loading*) dimana jika FL suatu item > 0,5 maka item tersebut valid, dan sebaliknya jika FL dalam angket < 0,5 maka item tidak valid. Dari hasil analisis data (pada lampiran) didapatkan nilai KMO sebesar 0,769, MSA masing item > 0,5 dan *factor loading* > 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Adapun nilai faktor loadingnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2.  
Uji Validitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Components | Keterangan |
| KWP1 | 0,868 | VALID |
| KWP2 | 0,801 | VALID |
| KWP3 | 0,749 | VALID |
| KWP4 | 0,808 | VALID |
| KWP5 | 0,863 | VALID |
| PWP1 | 0,796 | VALID |
| PWP2 | 0,779 | VALID |
| PWP3 | 0,718 | VALID |
| PWP4 | 0,698 | VALID |
| PWP5 | 0,764 | VALID |
| PWP6 | 0,760 | VALID |
| PWP7 | 0,816 | VALID |
| PWP8 | 0,779 | VALID |
| PWP9 | 0,784 | VALID |
| PP1 | 0,737 | VALID |
| PP2 | 0,840 | VALID |
| PP3 | 0,816 | VALID |
| PP4 | 0,869 | VALID |
| PP5 | 0,848 | VALID |
| KPWP1 | 0,778 | VALID |
| KPWP2 | 0,734 | VALID |
| KPWP3 | 0,780 | VALID |

Sumber: data primer yang diolah 2022

1. **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2016: 178). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran dengan alat tersebut sama atau hampir sama jika sekiranya pengukuran itu dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukuran yang digunakan adalah teknik *cronbach’s alpha.* Dalam penelitian ini uji reliabilitas dengan teknik *cronbach’s alpha* dibantu dengan perangkat lunak program *SPSS for Windows.*

Nilai alpha hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai *alpha* > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel. Menurut Arikunto (2002: 169) tingkat reliabilitas dapat dikategorikan menjadi:

0,80 – 1 = sangat tinggi

0,60 – 0,799 = tinggi

0,40 – 0,599 = rendah

0,20 – 0,399 = sangat rendah

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 24, maka dapat diketahui reliabilitas setiap variabel.

Tabel 3. 3.  
Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah** | ***R*hitung** | ***R*tabel** | **Keterangan** |
| Kesadaran wajib pajak | 0,9306 | 0,60 | Reliabel |
| Pengetahuan wajib pajak | 0,9234 | 0,60 | Reliabel |
| Pemeriksaan pajak | 0,9060 | 0,60 | Reliabel |
| Kepatuhan wajib pajak | 0,8617 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa pertanyaan yang merupakan dimensi dari variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel karena r hitung > 0,60.

### Uji Analisis Regresi

Analisis linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) Ghozali, 2018: 54. Persamaan regresinya sebagai berikut:

Y = a + b1 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Y = variabel terikat

a = konstanta

b1, b2, b3 = koefisien regresi

X1, X2, X3  = variabel bebas

e = error (faktor pengganggu)

Adapun persamaan linier regresi berganda pada penelitian ini yaitu:

Y = a + **b1kesadaran wajib pajak + b2pengetahuan wajib pajak + b3pemeriksaan pajak**

Y = kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b1, b2, b3 = koefisien regresi

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = pengetahuan wajib pajak

X3 = pemeriksaan pajak

e = error (faktor pengganggu)

### Uji t

Uji signifikansi parsial atau sering disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) t yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### Uji F

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak) akan diikuti oleh variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2018).

# 

# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

## Deskripsi Data Subyek Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan ada tidaknya pengaruh variabel bebas (kewajiban wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta yang berjumlah total 147 orang. Kriteria wajib pajak yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bekerja sebagai karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta serta bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 60 orang karyawan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Surakarta yang beralamatkan di Komplek Balai Kota Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta. Seperti yang dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPPKAD Kota Surakarta merumuskan Visi sebagai berikut: “**Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan**”.

Dalam mencapai visi tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan tata pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara akuntabel dan transparan;
3. Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara optimal.

Demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta menetapkan sususan organisasi guna pendistribusian tugas dan wewenang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, disusunlah tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
2. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan.

1. Fungsi

Dalam menuntaskan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi pendaftaran dan pendataanwajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi;
4. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
6. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
8. Penyelenggaraan sosialisasi;
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan
10. Pengelolaan UPT.
11. Struktur Organisasi
12. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data. Bidang Pendaftaran dan Pendapatan membawahkan:

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
3. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan
4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahkan:

1. Sub bidang penagihan
2. Sub bidang keberatan
3. Sub bidang kepatuhan
4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD. Bidang Anggaran membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
2. Sub Bidang Pelaksnaaan Anggaran
3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. Bidang Perbendaharaan membawahkan:

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
2. Sub Bidang Belanja Langsung
3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
4. Bidang Akuntansi

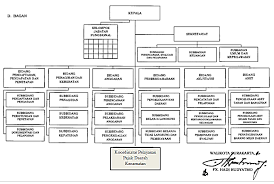
Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta. Bidang Akuntansi membawahkan:

1. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan
2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi
4. Bidang Aset

Bidang Aset memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Bidang Aset membawahkan:

1. Sub Bidang Pengelolaan Aset Selain Tanah dan Bangunan
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan
3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dari penjabaran struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di atas dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 4. 1.Struktur Organisasi BPPKAD Kota Surakarta

Di dalam struktur organisasi tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi dan misi yang mana terdiri dari 147 pegawai yang bertugas dalam tugas dan keahliannya masing-masing. Pegawai-pegawai tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1.  
Rincian Jumlah Pegawai BPPKAD Kota Surakarta(Menurut Jabatan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1. | Pegawai Eselon II | 1 |
| 2. | Pegawai Eselon III A | 1 |
| 3. | Pegawai Eselon III B | 7 |
| 4. | Pegawai Eselon IV A | 22 |
| 5. | Pegawai Eselon IV B | 5 |
| 6. | Staff PNS | 96 |
| 7. | Staff Tenaga Harian Lepas (THL) | 15 |

*Sumber:* Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang dimiliki Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta yaitu 147 pegawai, yang terdiri dari Pegawai Eselon II sejumlah 1 orang, Pegawai Eselon III A sejumlah 1 orang, Pegawai Eselon III B sejumlah 7 orang, Pegawai Eselon IV A sejumlah 22 orang, Pegawai Eselon IV B sejumlah 5 orang, pegawai Staff Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 96 orang, serta pegawai Staff Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 15 orang.

## Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis dan pembahasan terhadap data yang dihasilkan dari kuesioner. Populasi atau unverse adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, Singarimbun & Effendi (2011). Populasi pada penelitian ini adalah karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta yang berjumlah 147 orang.

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling sampling technique*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan meggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85).

Kriteria wajib pajak yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bekerja sebagai karyawan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta serta bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 60 orang karyawan.

Analisis linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, maka di dapatkan data sebagai berikut:

### Analisis Deskripsi Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan dengan gambaran penyebaran subyek atau responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2.  
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Kelamin** | **Jumlah Responden** | % |
| Perempuan  Laki-laki | 25  35 | 41,67  53,33 |
| **Jumlah** | 60 | 100 |

Sumber: Data primer Diolah 2022

Berdasarkan sampel responden pada jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah responden perempuan sebanyak 25 orang (41,67%) dan laki-laki sebanyak 35 orang (53,33%).

### Analisis Deskripsi Usia

Berdasarkan usia subyek atau responden penelitian, peneliti mendapatkan sampel dengan rentang usia dari 25 tahun sampai dengan 45 tahun dan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3.  
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Umur** | **Jumlah Responden** | **%** |
| **<25** | 8 | 13,33 |
| **26 – 35** | 27 | 45 |
| **36 – 45** | 15 | 25 |
| **46 – 45** | 10 | 16,67 |
| **Jumlah** | 60 | 100 |

Sumber: data primer diolah 2022

Usia dari wajib pajak adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan kepatuhan. Hubungan usia dengan kepatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Pada umumnya, wajib pajak dengan usia muda kurang sensitif terhadap hukuman dan lebih berani dalam mengambil risiko. Richardson & Sawyer (dalam Aryati, 2012) menemukan bahwa wajib pajak dengan usia yang lebih tua akan lebih patuh dibanding wajib pajak yang lebih muda. Sebaran data yang diperoleh pada penelitian sebagian besar berusia 26-35 tahun yaitu 27 orang (27%), berusia 36-45 tahun sebesar 15 orang (45%), 36-45 tahun sebesar 15 orang (25%), dan usia 46-55 tahun sebesar 10 orang (16,67%).

### Analisis Deskripsi Tingkat Pendidikan

Kepatuhan dalam membayar pajak dapat didasarkan oleh tingkat pendidikan seorang wajib pajak. Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, seharusnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam membayar pajak dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, orang dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih terkendala dalam membayar pajak karena sistem perpajakan hari ini sudah lebih modern, yaitu memerlukan internet. Tingkat pendidikan yang rendah itulah yang dapat membatasi seseorang tidak mau membayar pajak karena dianggap akan lebih sulit dalam mengakses cara penggunaan aplikasi perpajakan (Florientina dan Nugroho, 2021).

Berdasarkan tingkat pendidikan subyek atau responden penelitian, peneliti mendapatkan sampel dengan rentang tingkat pendidikan mulai dari jenjang SMU sampai dengan S2 dan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4.  
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendidikan** | **Jumlah Responden** | **%** |
| SMU | 5 | 8,33 |
| D3 | 17 | 36,67 |
| S1 | 35 | 50 |
| S2 | 3 | 5 |
| **Jumlah** | 60 | 100 |

Sumber: data primer diolah 2022

Sebaran data yang diperoleh pada penelitian sebagian besar berpendidikan S1 sebesar 35 orang (50%), berpendidikan D3 sebesar 17 orang (36,37%), berpendidikan SMU sebesar 5 orang (8,33%), dan berpendidikan S2 sebesar 3 orang (5%).

### Analisis Deskripsi Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja subyek atau responden penelitian, peneliti mendapatkan sampel dengan rentang masa kerja kurang dari t tahun sampai dengan lebih dari 10 tahun dan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5.  
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Masa Kerja** | **Jumlah Responden** | **%** |
| **< 5 Tahun** | 15 | 25 |
| **6 – 10** | 35 | 58,33 |
| **> 10 Tahun** | 10 | 16,67 |
| **Jumlah** | 60 | 100 |

Sumber: data primer diolah 2022

Sebaran data yang diperoleh pada penelitian sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sebesar 75%. Sedangkan sisanya yang masa kerja kurang dari 5 tahun sebesar 25%.

### Distribusi Tanggapan Responden

Deskripsi jawaban setiap item pertanyaan pada dasarnya untuk melihat jumlah responden yang menjawab setiap alternatif jawaban yang telah disediakan. Dari hasil jawaban responden yang telah diperoleh, maka dapat diketahui masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden, disamping itu juga dapat diketahui jawaban yang pada umumnya dipilih oleh responden. Hasil dari distribusi frekuensi jawaban responden dikelompokkan pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Pernyataan** | **Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| **STS** | | **TS** | | **KS** | | **S** | | **SS** | |
| **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** |
| 1 | Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. | | 0 | 0 | 21 | 35 | 20 | 33 | 19 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. | | 0 | 0 | 10 | 17 | 32 | 53 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Saya mengetahui membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan daerah. | | 0 | 0 | 10 | 17 | 21 | 35 | 29 | 48 | 0 | 0 |
| 4 | Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran Pajak. | | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 | 53 | 15 | 25 | 1 | 2 |
| 5 | Saya membayar dan melaporkan Pajak dengan sukarela. | | 0 | 0 | 20 | 33 | 28 | 47 | 11 | 18 | 1 | 2 |

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Dari tabel di atas, pada variabel kesadaran wajib pajak dapat diketahui bahwa pertanyaan 1 sebanyak 32% responden menyatakan setuju (KWP1) bahwa Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. Pada pertanyaan 2 (KWP2) sebanyak 53% Responden berpendapat kurang setuju bahwa Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, pertanyaan 3 (KWP3) sebanyak 48% responden setuju bahwa Saya mengetahui membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan daerah, pertanyaan 4 (KWP4) sebanyak 53% setuju bahwa Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran Pajak, dan pertanyaan 5 (KWP5) sebanyak 47% setuju bahwa Saya membayar dan melaporkan Pajak dengan sukarela.

Tabel 4. 7.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak

| **No** | **Pertnyataan** | **Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | | **TS** | | **KS** | | **S** | | **SS** | |
| **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** |
| 1 | Saya mengetahui ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pajak yang berlaku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 35 | 34 | 57 |
| 2 | Saya mengetahui bahwa pajak harus dilaporkan dan dibayarkan tepat waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 47 | 27 | 45 |
| 3 | Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar baik untuk pusat maupun daerah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 8 | 26 | 43,3 | 29 | 48,4 |
| 4 | Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 32 | 53 | 19 | 32 |
| 5 | Saya dapat dengan mudah memahami prosedur pembayaran pajak yang berlaku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | 53 | 24 | 40 |
| 6 | Saya mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | 52 | 23 | 38 |
| 7 | Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila pembayaran pajak tidak dilakukan tepat pada waktunya. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 38 | 33 | 55 |
| 8 | Saya mengetahui adanya sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 34 | 57 | 17 | 28 |
| 9 | Saya dapat memahami sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 33 | 33 | 55 |

Sumber: Data primer diolah 2022

Karakteristik jawaban responden pada item pertanyaan variabel pengetahuan wajib pajak, yang terbesar menyatakan setuju pada pertanyaan 1 (PWP1) 57% yaitu Sangat setuju bahwa Saya mengetahui ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pajak yang berlaku. Pada pertanyaan 2 (PWP2) yaitu sebesar 47% setuju bahwa Saya mengetahui bahwa pajak harus dilaporkan dan dibayarkan tepat waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Pada pertanyaan 3 (PWP3) yaitu sebesar 48% sangat setuju bahwa Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar baik untuk pusat maupun daerah. Pada pertanyaan 4 (PWP4) yaitu sebesar 53% setuju bahwa Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Pada pertanyaan 5 (PWP5) yaitu sebesar 53% setuju bahwa Saya dapat dengan mudah memahami prosedur pembayaran pajak yang berlaku. Pada pertanyaan 6 (PWP6) yaitu sebesar 52% setuju bahwa Saya mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan. Pada pertanyaan 7 (PWP7) yaitu sebesar 55% sangat setuju bahwa Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila pembayaran pajak tidak dilakukan tepat pada waktunya. Pada pertanyaan 8 (PWP8) yaitu sebesar 57% setuju bahwa Saya mengetahui adanya sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. Pada pertanyaan 9 (PWP9) yaitu sebesar 55% Sangat setuju bahwa Saya dapat memahami sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak.

Tabel 4. 8.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Pemeriksaan Pajak

| **No** | **Pernyataan** | **Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | | **TS** | | **KS** | | **S** | | **SS** | |
| **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** |
| 1 | Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan. | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 36 | 25 | 42 | 11 | 18 |
| 2 | Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 45 | 75 | 4 | 7 |
| 3 | Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 39 | 65 | 9 | 15 |
| 4 | Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, kurang bayar maupub lebih bayar, maka harus dilakukan pemeriksaan. | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 18 | 40 | 67 | 4 | 7 |
| 5 | Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 20 | 36 | 60 | 7 | 12 |

Sumber: Data primer diolah 2022

Karakteristik jawaban responden pada item pertanyaan variabel pemeriksaan pajak yang paling dominant menyatakan setuju adalah pertanyaan no.2 (PP2) sebesar 75% yaitu bahwa Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai saranan penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan merupakan salah satu Langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tabel 4. 9.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak

| **No** | **Pertnyataan** | **Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | | **TS** | | **KS** | | **S** | | **SS** | |
| **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** | **Jml** | **%** |
| 1 | Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | 33 | 55 | 12 | 20 |
| 2 | Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. | 0 | 0 | 14 | 23 | 19 | 32 | 10 | 17 | 17 | 28 |
| 3 | Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. | 0 | 0 | 7 | 12 | 23 | 38 | 16 | 27 | 14 | 23 |

Sumber: Data primer diolah 2022

Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Karakteristik jawaban responden pada item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak yang paling dominant menyatakan setuju adalah item no.1 (KPWP1) sebesar 55% yaitu Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Analisis Data

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu diadakan uji angket atau yang disebut pengujian instrumen. Pada tahap uji instrumen ini sebanyak 70 kuesioner disebarkan dan yang dapat diolah sebesar 60 responden dikarenakan 10 kuesiner telah rusak atau tidak lengkap. Uji instrumen terdiri dari validitas dan reliabilitas.

### Uji Validitas

Uji validitas tiap butir dilakukan dengan cara menganalisis tiap butir pertanyaan dari keempat faktor yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor merupakan proses menilai mana saja variabel yang layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Kriteria data yang dapat dianalisis faktor adalah yang menunjukkan uji KMO (*Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequecy*) dan *Barlet’s Test of Sphericity* di atas 0,5 dan signifikansi di bawah 0,05 serta Koefisien *Anti Image Matrics* sebagai *Measures of Sampling Adequacy* (MSA) minimal 0,5.

Menurut Hair *et al*., (1998) menyatakan bahwa suatu analisis faktor dinyatakan *feasible* bila memenuhi syarat uji KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) > 0,5 dan *Bartlett’s Test of Sperincity* pada signifikansi > 0,05. Koefisien *Anti Image Matrics* sebagai *Measures of Sampling Adequacy* (MSA) minimal 0,4. Tinggi rendahnya validitas suatu angket dengan melihat FL (*Factor Loading*) dimana jika FL suatu item > 0,5 maka item tersebut valid, dan sebaliknya jika FL dalam angket < 0,5 maka item tidak valid. Dari hasil analisis data (pada lampiran) didapatkan nilai KMO sebesar 0,769, MSA masing item > 0,5 dan factor loading > 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid. Adapun nilai faktor loadingnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 10.Uji Validitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Components | Keterangan |
| KWP1 | 0,868 | VALID |
| KWP2 | 0,801 | VALID |
| KWP3 | 0,749 | VALID |
| KWP4 | 0,808 | VALID |
| KWP5 | 0,863 | VALID |
| PWP1 | 0,796 | VALID |
| PWP2 | 0,779 | VALID |
| PWP3 | 0,718 | VALID |
| PWP4 | 0,698 | VALID |
| PWP5 | 0,764 | VALID |
| PWP6 | 0,760 | VALID |
| PWP7 | 0,816 | VALID |
| PWP8 | 0,779 | VALID |
| PWP9 | 0,784 | VALID |
| PP1 | 0,737 | VALID |
| PP2 | 0,840 | VALID |
| PP3 | 0,816 | VALID |
| PP4 | 0,869 | VALID |
| PP5 | 0,848 | VALID |
| KPWP1 | 0,778 | VALID |
| KPWP2 | 0,734 | VALID |
| KPWP3 | 0,780 | VALID |

Sumber: data primer yang diolah 2022

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu akurat, stabil dan konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali dengan subjek yang sama. Dalam uji reliabilitas menggunakan rumus *alpha croncbach*. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 24 maka dapat diketahui reliabilitas setiap variabel.

Tabel 4. 11.Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah** | ***R*hitung** | ***R*tabel** | **Keterangan** |
| Kesadaran wajib pajak | 0,9306 | 0,60 | Reliabel |
| Pengetahuan wajib pajak | 0,9234 | 0,60 | Reliabel |
| Pemeriksaan pajak | 0,9060 | 0,60 | Reliabel |
| Kepatuhan wajib pajak | 0,8617 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.11, dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa pertanyaan yang merupakan dimensi dari variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel karena r hitung > 0,60.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta maka digunakan fungsi linear yaitu regresi berganda yang dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b 1 = Koefisien regresi dari Kesadaran wajib pajak (X1)

X1 = Kesadaran wajib pajak

b 2 = Koefisien regresi dari Pengetahuan wajb pajak (X2)

X 2 = Pengetahuan wajib pajak

b 3 = Koefisien regresi dari Pemeriksaan pajak (X3)

X 3 = Pemeriksaan pajak

Tabel 4. 12.  
Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Koefisien Regresi** | **t hitung** | **t tabel** | **Signifikan** |
| Kesadaran wajib pajak | 0,260 | 2,819 | 1,67 | 0,000 |
| Pengetahuan wajib pajak | 0,138 | 2,309 | 1,67 | 0,005 |
| Pemeriksaan pajak | 0,237 | 2,482 | 1,67 | 0,006 |
| Constanta | 8,796 |  | | |
| Adj.R Square | 0,950 |
| R square | 0,952 |
| F hitung | 373,303 |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil uji pengolahan data tabel 4.12 di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 8,796 + 0,260 X 1 + 0,138 X 2 + 0,237 X 3

Berdasarkan persamaan linier berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (8,796)

Konstanta bernilai positif menunjukkan bahwa apabila terdapat faktor kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sangat kuat.

1. Koefisien regresi faktor kesadaran wajib pajak (0,260)

Nilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang signifikan antara faktor kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya apabila kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

1. Koefisien regresi faktor pengetahuan wajib pajak (0,138)

Koefisien regresi pada faktor pengetahuan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila pengetahuan wajib pajak semakin baik, maka kepatuhannya akan semakin baik.

1. Koefisien regresi faktor pemeriksaan pajak (0,237)

Koefisien regresi linier pada faktor pemeriksaan pajak menunjukkan nilai positif, yaitu terdapat hubungan searah yang signifikan antara faktor pemeriksaan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, artinya jika pemeriksaan pajak semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### Analisis Uji t (t-test)

Uji t atau disebut juga uji parsial dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (X) secara parsial (masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) dalam yaitu: Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis pada uji t (t-test) pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengujian pengaruh faktor kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2,819 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor kesadaran wajib pajak (X1) pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

1. Pengujian pengaruh faktor pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2.309 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor pengetahuan wajib pajak (X2) pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

1. Pengujian pengaruh faktor pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2.482 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor pemeriksaan pajak (X3) pada kepatuhan wajb pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh vaiabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05.

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4. 13, berikut ini.

Tabel 4. 13.   
Uji F

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 414,141 | 3 | 138,047 | 373,303 | ,000b |
| Residual | 20,709 | 56 | ,370 |  |  |
| Total | 434,850 | 59 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajak | | | | | | |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Tabel 4.13 menunjukkan adanya nilai Fhitung = 373,303 dengan sig = 0,000 < 5 %, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa nilai F yang dihitung tersebut signifikan yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

### Koefisien determinasi (R²)

Dalam melakukan pengukuran model regresi diperlukan pengujian koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan atau kesempurnaan model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan hasil dari pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4. 14.   
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,976a | ,952 | ,950 | ,608 | ,639 |
| a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) menunjukkan pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai (R²) sebesar 0,950. Dengan demikian, variabel independent kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 95,0%. Sedangkan 5,0% kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

## Pembahasan

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh postif pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2,819 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

Hipotesis tersebut menyatakan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari berbagai hal. Beberapa contoh faktor eksternal adalah: surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari fiskus, dll.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untukmembayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya tentunya akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi diikuti dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2010).

Teori atribusi menjelaskan bahwa dalam berperilaku individu dipengaruhi oleh atribusi internal atau eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat memengaruhi persepsi dari wajib pajak untuk membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Susherdianto dan Haryanto, 2012). Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman serta pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah perilaku atau sikap wajib pajak yang berasal dari dalam diri seseorang dan berkaitan dengan persepsi yang didalamnya termasuk suatu keyakinan, pengetahuan serta kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan dorongan atau motivasi yang diberikan sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Fikriningrum, 2012). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban atas kegiatan perpajakannya juga akan tinggi.

Muliari dan Setiawan (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, maka diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak.

Lebih lanjut, Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitf, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak, Mahdi & Ardiati (2017).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fitria (2017) dimana kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta mendukung penelitian oleh Manek (2019) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pravasanti dan Pratiwi (2021) yang menunjukkan bahwa kesadran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian mendukung hasil penelitian oleh Nafiah et al., (2021) yang juga membuktikan hasil yang konsisten yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Madjodjo (2022) yang membuktikan bahwa baik secara parsial maupun simultan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kepulauan Tidore.

### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Pada tabel 4.12, dapat dilihat pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2.309 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diperoses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak (Susilawati dan Budiartha, 2013).

Hardiningsih (2011), mengasumsikan meningkatnya pengetahuan pajak baik formal dan non formal akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi serta petugas pajak yang belum memadai. Rahayu (2010:141) menjelaskan terdapat beberapa indiktor yang perlu dipahami dan diketahui oleh wajib pajak, antara lain: (1) Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Fidiana (2017), menyatakan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui kosekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Menurut (Zain, 2008), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Manek (2019) menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian SalSabila (2020) dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wujarso (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup bisa Mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & Zhi Xin, 2016). Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat bayar pajak dengan itikad baik (Ariyanto et al., 2020).

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pada tabel 4.12, dapat dilihat pada taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung sebesar 2.482 > ttabel 1,67 maka Ho ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan meghimpun dana, mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan. Variabel pemeriksaan pajak disini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Wahyono (2018) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian oleh Lesmana (2020) dan Windasari (2021) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Artinya pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran, sebagai berikut.

1. Kantor Badan Penadapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta

Diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil peran dan tindakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara menjadi tinggi dan negara mempunyai kemampuan lebih untuk membiayai belanjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, agar dapat mengembangkan penelitian ini. Selanjutnya juga dapat dikaitakan dengan factor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, seperti sanksi administrasi yang menjadi bagian dari indikator pengetahuan wajib pajak namun tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

# 

# DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D.S., Musadieq, M.A. dan Dwiatmanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jurnal Perpajakan; (online), Vol.8 No.1.

Anggraeni.G. (2017). Pengaruh Pemerksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.Jurnal Akuntansi.

Anggadhika,T.G.A.W.P.P dan Jati.K. (2019). Pengaruh kepemilikan NPWP, Pemeriksa, Penagihan, Kesadaran WP Terhadap penerimaan pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Udayana. (online), Vol8. No.5.

Aprilina.K.R. (2016). Pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. Jurnal Riset Mahasiswa Accounting.Vol 20. No 20.

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ 2013 Tentang Standar Pemeriksaan.

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2017).” Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.”

Erwis,N.A. (2012). Efektifitas Penagihan Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, jurnal riset akuntansi.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Giang, R.S. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak SPT Tahunan PPH Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi

Hudany.R.W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Solok, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Husain. N.Q. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi.

Ipotnews. Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak. https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini\_4\_Strategi\_Kemenk eu\_Tingkatkan\_Kepatuhan\_Pajak, (online), Di akses 26 Mei 2022.

Lasmaya, S.M., dan Fitriani, N.N. (2017). Pengaruh Self Assesstment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal computech & Bisnis; (online), Vol.11, No. 2.

Mardya Fitrianingsih. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jurnal Akuntansi.

Margono. S. (2000). Metodologi penelitian pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta.

Mariana L. (2017). Optimalisasi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Jurnal Office, vol.3, No.1.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Moenir. H.A.S. (2011). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Mohammad I,Dkk. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pekayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi.Vol.12. No.2.

Mohammad, Zain. (2008). Manajemen Perpajakan Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Nurmanto, Safri. (2007). Pengantar Perpajakan. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Nurul Afifah, Dkk. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Jurnal Tangible, Vol. 3 No.1.

Palupi.D.Y,Herianti.E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Informasi Tren Media Sebagai Variabel Moderating. Jurnal infestasi.Vol.13. No.1.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Primerdo.R.Y. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. Jurnal Akuntansi.

Rahayu, Siti Kurnia, (2010). Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Riski Hamdani. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal akuntansi.

Ronalyw. (2019). Jumlah WP diSulsel Meningkat.https://beritakotamakassar. fajar.co.id/berita/2019/03/19/2019-jumlah-wpsulsel-meningkat/, (Online), Di akses 25 Juni 2022.

Sari. Y. W, (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal Fekon, Vol.2. No.2.

Sugiyono. (2010). Statistik Untuk Penellitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Suhendra, E.S. (2011). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 15.

Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini berlaku tanggal 23 Mei 1997, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Universitas Muhammadiyah Makassar. (2017). Pedoman penulisan skripsi. Makassar.

Wahda.N.S.R, Bagianto.A, Yunita. (2016). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal ilmiah manajemen ekonomi dan akuntansi. Vol.2. No.2.

Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

[Www.pajak.go.id](http://Www.pajak.go.id).

Yamin.S., Kurniawan.H. (2014). SPSS Complete. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

Lampiran 1.Kuesioner

**KUESIONER**

Dengan hormat, saya **Aditya Widiatama** sedang melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Seluruh data dan informasi akan dianalisis dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir di Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta. Kesediaan Anda dalam mengisi kuesioner ini akan sangat membantu. Terima kasih.

**Petunjuk:** Kuesioner ini berisi sejumlah pernyataan. Silahkan anda tunjukkan seberapa besar tingkat pilihan anda terhadap pernyataan dengan memberi tanda X pada kotak jawaban yang dipilih. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka **kuesioner dianggap tidak berlaku**. Tidak ada jawaban benar salah. Anda cukup menjawab langsung sesuai dengan apa yang muncul pertama kali dalam pikiran Anda. Selamat mengisi kuesioner ini!

**Data Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Kelamin: | Umur: | Pendidikan : | Masa Kerja: |
| * Laki-Laki * Wanita | * > 25 Th * 26 – 35 Th * 36 – 45 Th * 46 – 45 Th | * SMU * D3 * S1 | * < 5 Th * 6 -10 Th * > 10 Th |

**KESADARAN WAJIB PAJAK**

Pilihan Jawaban:

ST = Sangat Setuju, S= Setuju, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

| **NO** | **PERNYATAAN** | **JAWABAN RESPONDEN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | **TS** | **KS** | **S** | **SS** |
|  | | | | |
| 1 | Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. |  |  |  |  |  |
| 3 | Saya mengetahui membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan daerah. |  |  |  |  |  |
| 4 | Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran Pajak. |  |  |  |  |  |
| 5 | Saya membayar dan melaporkan Pajak dengan sukarela. |  |  |  |  |  |

**PENGETAHUAN WAJIB PAJAK**

Pilihan Jawaban:

ST = Sangat Setuju, S= Setuju, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

| **NO** | **PERNYATAAN** | **JAWABAN RESPONDEN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | **TS** | **KS** | **S** | **SS** |
|  | | | | |
| 1 | Saya mengetahui ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pajak yang berlaku. |  |  |  |  |  |
| 2 | Saya mengetahui bahwa pajak harus dilaporkan dan dibayarkan tepat waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. |  |  |  |  |  |
| 3 | Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar baik untuk pusat maupun daerah. |  |  |  |  |  |
| 4 | Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. |  |  |  |  |  |
| 5 | Saya dapat dengan mudah memahami prosedur pembayaran pajak yang berlaku. |  |  |  |  |  |
| 6 | Saya mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan. |  |  |  |  |  |
| 7 | Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila pembayaran pajak tidak dilakukan tepat pada waktunya. |  |  |  |  |  |
| 8 | Saya mengetahui adanya sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. |  |  |  |  |  |
| 9 | Saya dapat memahami sistem perpajakan yang ditetapkan untuk pembayaran pajak. |  |  |  |  |  |

**PEMERIKSAAN PAJAK**

Pilihan Jawaban:

ST = Sangat Setuju, S= Setuju, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

| **No** | **PERNYATAAN** | **JAWABAN RESPONDEN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | **TS** | **KS** | **S** | **SS** |
|  | | | | |
| 1 | Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. |  |  |  |  |  |
| 3 | Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. |  |  |  |  |  |
| 4 | Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, kurang bayar maupun lebih bayar, maka harus dilakukan pemeriksaan. |  |  |  |  |  |
| 5 | Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. |  |  |  |  |  |

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Pilihan Jawaban:

ST = Sangat Setuju, S= Setuju, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

| **No** | **PERNYATAAN** | **JAWABAN RESPONDEN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | **TS** | **KS** | **S** | **SS** |
|  | | | | |
| 1 | Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |  |  |  |  |  |
| 2 | Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. |  |  |  |  |  |
| 3 | Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. |  |  |  |  |  |

Lampiran 2.Tabulasi Data Penelitian

**TABULASI DATA PENELITIAN**

* + - 1. **Data Responden**

| **RESPONDEN** | **JENIS KELAMIN** | **UMUR** | **PENDIDIKAN** | **MASA KERJA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 37 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 38 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 41 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 44 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 45 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 46 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 47 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 48 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 49 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 50 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 51 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 52 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 53 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 54 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 55 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 56 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 57 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 58 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 59 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 60 | 2 | 4 | 4 | 3 |

* + - 1. **Kesadaran Wajib Pajak**

| **RESPONDEN** | | **KWP1** | **KWP2** | **KWP3** | **KWP4** | **KWP5** | **SUM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | SRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | MRT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | SFTRI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | KURNA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | DNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | GYH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | LRS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | SNJY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | BRTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | FNA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 12 | MRY | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 13 | JN | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 14 | AJ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | OBY | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 16 | BNU | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 17 | LUTFA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 18 | AMLY | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 19 | SGNG | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 20 | DJAT | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 21 | GTT | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 22 | ANTN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 23 | WHY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 24 | SLMT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 25 | JKO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 26 | BARU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 27 | WRTMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 28 | BNN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 29 | TRI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 30 | GNTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 31 | SLTRY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 32 | WNRNI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 33 | SGIT | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 34 | ARDN | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 35 | MNKA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 36 | JSME | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 37 | ZDN | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 38 | RZA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 39 | NAND | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 40 | BLLA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 41 | FAUZH | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 42 | ESTR | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 43 | KURNA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 44 | SRI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 45 | PUSPTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 46 | DVNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 47 | WNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 48 | AGNG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 49 | YUNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | MEISY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | PRANYT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | FRANSCO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | TKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | DMAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | SOURN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | DVD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | KRSNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | YOHNNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 59 | WIBWO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 60 | LINTG | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
|  |  | 178 | 188 | 199 | 185 | 173 | 923 |

* + - 1. **Pengetahuan Wajib Pajak**

| **RESPONDEN** | | **PWP1** | **PWP2** | **PWP3** | **PWP4** | **PWP5** | **PWP6** | **PWP7** | **PWP8** | **PWP9** | **SUM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 2 | SRW | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 3 | MRT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | SFTRI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | KURNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 6 | DNG | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 7 | GYH | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 8 | LRS | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 9 | SNJY | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 10 | BRTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | FNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | MRY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | JN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | AJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | OBY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | BNU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | LUTFA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | AMLY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | SGNG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | DJAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | GTT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | ANTN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | WHY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | SLMT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | JKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | BARU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | WRTMA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 28 | BNN | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 29 | TRI | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 30 | GNTR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 31 | SLTRY | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 32 | WNRNI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 33 | SGIT | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 34 | ARDN | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| 35 | MNKA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| 36 | JSME | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| 37 | ZDN | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 38 | RZA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 39 | NAND | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 40 | BLLA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 41 | FAUZH | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 42 | ESTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 43 | KURNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 44 | SRI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 45 | PUSPTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 46 | DVNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 47 | WNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 48 | AGNG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 49 | YUNN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 50 | MEISY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 51 | PRANYT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 52 | FRANSCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 53 | TKA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 54 | DMAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 55 | SOURN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 56 | DVD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 57 | KRSNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 58 | YOHNNS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 59 | WIBWO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 60 | LINTG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
|  |  | 269 | 262 | 264 | 248 | 260 | 257 | 269 | 248 | 266 | 2343 |

* + - 1. **Pemeriksaan Pajak**

| **RESPONDEN** | | **PP1** | **PP2** | **PP3** | **PP4** | **PP5** | **SUM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | SRW | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | MRT | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | SFTRI | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | KURNA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | DNG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | GYH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | LRS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | SNJY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | BRTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | FNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 12 | MRY | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 13 | JN | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 14 | AJ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 15 | OBY | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 16 | BNU | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 17 | LUTFA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 18 | AMLY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 19 | SGNG | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 20 | DJAT | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 21 | GTT | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 22 | ANTN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 23 | WHY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 24 | SLMT | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 25 | JKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | BARU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | WRTMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | BNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | TRI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | GNTR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | SLTRY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | WNRNI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | SGIT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | ARDN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | MNKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | JSME | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | ZDN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | RZA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | NAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | BLLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | FAUZH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | ESTR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | KURNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | SRI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | PUSPTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | DVNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | WNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | AGNG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | YUNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | MEISY | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 51 | PRANYT | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 52 | FRANSCO | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 53 | TKA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 54 | DMAS | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 55 | SOURN | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 56 | DVD | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 57 | KRSNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 58 | YOHNNS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 59 | WIBWO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 60 | LINTG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  |  | 225 | 231 | 237 | 225 | 225 | 1143 |

* + - 1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

| **RESPONDEN** | | **KPWP1** | **KPWP2** | **KPWP3** | **SUM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | SRW | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | MRT | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | SFTRI | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | KURNA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | DNG | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | GYH | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | LRS | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | SNJY | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | BRTO | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | FNA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | MRY | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | JN | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | AJ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | OBY | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | BNU | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 17 | LUTFA | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 18 | AMLY | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 19 | SGNG | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | DJAT | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 21 | GTT | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 22 | ANTN | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 23 | WHY | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 24 | SLMT | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 25 | JKO | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 26 | BARU | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 27 | WRTMA | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 28 | BNN | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 29 | TRI | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 30 | GNTR | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 31 | SLTRY | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 32 | WNRNI | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 33 | SGIT | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 34 | ARDN | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 35 | MNKA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 36 | JSME | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 37 | ZDN | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 38 | RZA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 39 | NAND | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 40 | BLLA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 41 | FAUZH | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 42 | ESTR | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 43 | KURNA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 44 | SRI | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 45 | PUSPTA | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 46 | DVNA | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 47 | WNA | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 48 | AGNG | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 49 | YUNN | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 50 | MEISY | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 51 | PRANYT | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 52 | FRANSCO | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 53 | TKA | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 54 | DMAS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 55 | SOURN | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 56 | DVD | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 57 | KRSNA | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 58 | YOHNNS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 59 | WIBWO | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 60 | LINTG | 5 | 5 | 5 | 15 |
|  |  | 236 | 210 | 217 | 663 |

Lampiran 3. Hasil Olah Data

1. **Distribusi Data Responden**

**Descriptives**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | | | | |
|  | N | Range | Minimum | Maximum | Sum | Mean | Std. Deviation | Variance |
| jenis kelamin | 60 | 1 | 1 | 2 | 95 | 1,58 | ,497 | ,247 |
| Umur | 60 | 3 | 1 | 4 | 147 | 2,45 | ,928 | ,862 |
| Pendidikan | 60 | 3 | 1 | 4 | 156 | 2,60 | ,718 | ,515 |
| masa kerja | 60 | 2 | 1 | 3 | 115 | 1,92 | ,645 | ,417 |
| Valid N (listwise) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

**Frequencies**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statistics** | | | | | |
|  | | jenis kelamin | umur | pendidikan | masa kerja |
| N | Valid | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 1,58 | 2,45 | 2,60 | 1,92 |
| Median | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Mode | | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Std. Deviation | | ,497 | ,928 | ,718 | ,645 |
| Variance | | ,247 | ,862 | ,515 | ,417 |
| Range | | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Minimum | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum | | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Sum | | 95 | 147 | 156 | 115 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **jenis kelamin** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | perempuan | 25 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| laki-laki | 35 | 58,3 | 58,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 100,0 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umur** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | <25 | 8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 26-35 | 27 | 45,0 | 45,0 | 58,3 |
| 36-45 | 15 | 25,0 | 25,0 | 83,3 |
| 46-45 | 10 | 16,7 | 16,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 100,0 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pendidikan** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | SMU | 5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| D3 | 17 | 28,3 | 28,3 | 36,7 |
| S1 | 35 | 58,3 | 58,3 | 95,0 |
| S2 | 3 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 100,0 | 100,0 |  |

1. **Distribusi Tanggapan Responden**

**Descriptives**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | | | | |
|  | N | Range | Minimum | Maximum | Sum | Mean | Std. Deviation | Variance |
| KWP1 | 60 | 2 | 2 | 4 | 178 | 2,97 | ,823 | ,677 |
| KWP2 | 60 | 2 | 2 | 4 | 188 | 3,13 | ,676 | ,456 |
| KWP3 | 60 | 2 | 2 | 4 | 199 | 3,32 | ,748 | ,559 |
| KWP4 | 60 | 3 | 2 | 5 | 185 | 3,08 | ,720 | ,518 |
| KWP5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 173 | 2,88 | ,761 | ,579 |
| PWP1 | 60 | 2 | 3 | 5 | 269 | 4,48 | ,651 | ,423 |
| PWP2 | 60 | 2 | 3 | 5 | 262 | 4,37 | ,637 | ,406 |
| PWP3 | 60 | 2 | 3 | 5 | 264 | 4,40 | ,643 | ,414 |
| PWP4 | 60 | 3 | 2 | 5 | 248 | 4,13 | ,747 | ,558 |
| PWP5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 260 | 4,33 | ,601 | ,362 |
| PWP6 | 60 | 2 | 3 | 5 | 257 | 4,28 | ,640 | ,410 |
| PWP7 | 60 | 2 | 3 | 5 | 269 | 4,48 | ,624 | ,390 |
| PWP8 | 60 | 2 | 3 | 5 | 248 | 4,13 | ,650 | ,423 |
| PWP9 | 60 | 2 | 3 | 5 | 266 | 4,43 | ,698 | ,487 |
| PP1 | 60 | 3 | 2 | 5 | 225 | 3,75 | ,795 | ,631 |
| PP2 | 60 | 3 | 2 | 5 | 231 | 3,85 | ,577 | ,333 |
| PP3 | 60 | 2 | 3 | 5 | 237 | 3,95 | ,594 | ,353 |
| PP4 | 60 | 3 | 2 | 5 | 225 | 3,75 | ,773 | ,597 |
| PP5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 225 | 3,75 | ,773 | ,597 |
| KPWP1 | 60 | 3 | 2 | 5 | 236 | 3,93 | ,710 | ,504 |
| KPWP2 | 60 | 3 | 2 | 5 | 210 | 3,50 | 1,142 | 1,305 |
| KPWP3 | 60 | 3 | 2 | 5 | 217 | 3,62 | ,976 | ,952 |
| Valid N (listwise) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

**Frequencies**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWP1** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 21 | 32,8 | 35,0 | 35,0 |
| kurang setuju | 20 | 31,3 | 33,3 | 68,3 |
| setuju | 19 | 29,7 | 31,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWP2** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 10 | 15,6 | 16,7 | 16,7 |
| kurang setuju | 32 | 50,0 | 53,3 | 70,0 |
| setuju | 18 | 28,1 | 30,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWP3** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 10 | 15,6 | 16,7 | 16,7 |
| kurang setuju | 21 | 32,8 | 35,0 | 51,7 |
| setuju | 29 | 45,3 | 48,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWP4** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 12 | 18,8 | 20,0 | 20,0 |
| kurang setuju | 32 | 50,0 | 53,3 | 73,3 |
| setuju | 15 | 23,4 | 25,0 | 98,3 |
| sangat setuju | 1 | 1,6 | 1,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWP5** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 20 | 31,3 | 33,3 | 33,3 |
| kurang setuju | 28 | 43,8 | 46,7 | 80,0 |
| setuju | 11 | 17,2 | 18,3 | 98,3 |
| sangat setuju | 1 | 1,6 | 1,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP1** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
| setuju | 21 | 32,8 | 35,0 | 43,3 |
| sangat setuju | 34 | 53,1 | 56,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP2** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
| setuju | 28 | 43,8 | 46,7 | 55,0 |
| sangat setuju | 27 | 42,2 | 45,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |
|  | | | | | |
| **PWP3** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
| setuju | 26 | 40,6 | 43,3 | 51,7 |
| sangat setuju | 29 | 45,3 | 48,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |
| **PWP4** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| kurang setuju | 7 | 10,9 | 11,7 | 15,0 |
| setuju | 32 | 50,0 | 53,3 | 68,3 |
| sangat setuju | 19 | 29,7 | 31,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP5** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 4 | 6,3 | 6,7 | 6,7 |
| setuju | 32 | 50,0 | 53,3 | 60,0 |
| sangat setuju | 24 | 37,5 | 40,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP6** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 6 | 9,4 | 10,0 | 10,0 |
| setuju | 31 | 48,4 | 51,7 | 61,7 |
| sangat setuju | 23 | 35,9 | 38,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP7** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 4 | 6,3 | 6,7 | 6,7 |
| Setuju | 23 | 35,9 | 38,3 | 45,0 |
| sangat tidak setuju | 33 | 51,6 | 55,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP8** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 9 | 14,1 | 15,0 | 15,0 |
| setuju | 34 | 53,1 | 56,7 | 71,7 |
| sangat setuju | 17 | 26,6 | 28,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PWP9** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 7 | 10,9 | 11,7 | 11,7 |
| setuju | 20 | 31,3 | 33,3 | 45,0 |
| sangat setuju | 33 | 51,6 | 55,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP1** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| kurang setuju | 22 | 34,4 | 36,7 | 40,0 |
| setuju | 25 | 39,1 | 41,7 | 81,7 |
| sangat setuju | 11 | 17,2 | 18,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP2** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| kurang setuju | 9 | 14,1 | 15,0 | 18,3 |
| setuju | 45 | 70,3 | 75,0 | 93,3 |
| sangat setuju | 4 | 6,3 | 6,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP3** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | kurang setuju | 12 | 18,8 | 20,0 | 20,0 |
| setuju | 39 | 60,9 | 65,0 | 85,0 |
| sangat setuju | 9 | 14,1 | 15,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP4** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
| kurang setuju | 12 | 18,8 | 20,0 | 28,3 |
| setuju | 36 | 56,3 | 60,0 | 88,3 |
| sangat setuju | 7 | 10,9 | 11,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP5** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
| kurang setuju | 12 | 18,8 | 20,0 | 28,3 |
| setuju | 36 | 56,3 | 60,0 | 88,3 |
| sangat setuju | 7 | 10,9 | 11,7 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPWP1** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| kurang setuju | 14 | 21,9 | 23,3 | 25,0 |
| setuju | 33 | 51,6 | 55,0 | 80,0 |
| sangat setuju | 12 | 18,8 | 20,0 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPWP2** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 14 | 21,9 | 23,3 | 23,3 |
| kurang setuju | 19 | 29,7 | 31,7 | 55,0 |
| setuju | 10 | 15,6 | 16,7 | 71,7 |
| sangat setuju | 17 | 26,6 | 28,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPWP3** | | | | | |
|  | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | tidak setuju | 7 | 10,9 | 11,7 | 11,7 |
| kurang setuju | 23 | 35,9 | 38,3 | 50,0 |
| setuju | 16 | 25,0 | 26,7 | 76,7 |
| sangat setuju | 14 | 21,9 | 23,3 | 100,0 |
| Total | 60 | 93,8 | 100,0 |  |
| Missing | System | 4 | 6,3 |  |  |
| Total | | 64 | 100,0 |  |  |

1. **Analisis Data**

**Uji validitas**

**Rotated Component Matrix**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Component | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| KWP1 |  |  | .868 |  |
| KWP2 |  |  | .801 |  |
| KWP3 |  |  | .749 |  |
| KWP4 |  |  | .808 |  |
| KWP5 |  |  | .863 |  |
| PWP1 | .796 |  |  |  |
| PWP2 | .779 |  |  |  |
| PWP3 | .718 |  |  |  |
| PWP4 | .698 |  |  |  |
| PWP5 | .764 |  |  |  |
| PWP6 | .760 |  |  |  |
| PWP7 | .816 |  |  |  |
| PWP8 | .779 |  |  |  |
| PWP9 | .784 |  |  |  |
| PP1 |  | .737 |  |  |
| PP2 |  | .840 |  |  |
| PP3 |  | .816 |  |  |
| PP4 |  | .869 |  |  |
| PP5 |  | .848 |  |  |
| KPWP1 |  |  |  | .778 |
| KPWP2 |  |  |  | .734 |
| KPWP3 |  |  |  | .780 |

**Uji reliabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah** | ***R*hitung** | ***R*tabel** | **Keterangan** |
| Kesadaran wajib pajak | 0,9306 | 0,60 | Reliable |
| Pengetahuan wajib pajak | 0,9234 | 0,60 | Reliable |
| Pemeriksaan pajak | 0,9060 | 0,60 | Reliable |
| Kepatuhan wajib pajak | 0,8617 | 0,60 | Reliable |

**Uji Regresi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | |
|  | Mean | Std. Deviation | N |
| Kepatuhan wajib pajak | 11,05 | 2,715 | 60 |
| Kesadaran wajib pajak | 15,38 | 3,474 | 60 |
| Pengetahuan wajib pajak | 39,05 | 5,472 | 60 |
| Pemeriksaan pajak | 19,05 | 3,270 | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variables Entered/Removeda** | | | |
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
| 1 | Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajakb | . | Enter |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | |
| b. All requested variables entered. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,976a | ,952 | ,950 | ,608 | ,639 |
| a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajak | | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 414,141 | 3 | 138,047 | 373,303 | ,000b |
| Residual | 20,709 | 56 | ,370 |  |  |
| Total | 434,850 | 59 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemeriksaan pajak | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 8,796 | ,746 |  | 9,498 | ,000 |
| Kesadaran wajib pajak | ,260 | ,069 | ,736 | 2,819 | ,000 |
| Pengetahuan wajib pajak | ,138 | ,039 | ,214 | 2,309 | ,005 |
| Pemeriksaan pajak | ,237 | ,059 | ,042 | 2,482 | ,006 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Residuals Statisticsa** | | | | | |
|  | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
| Predicted Value | 6,29 | 15,70 | 11,05 | 2,649 | 60 |
| Residual | -1,284 | ,725 | ,000 | ,592 | 60 |
| Std. Predicted Value | -1,798 | 1,753 | ,000 | 1,000 | 60 |
| Std. Residual | -2,111 | 1,191 | ,000 | ,974 | 60 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak | | | | | |